



Diduga fiktif Proyek Sapa-Pakuure Bakal 'Dibom'

Amurang, KOMENTAR

Dalam waktu dekat DPRD Minahasa Selatan (Minsel) menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati T.A 2019. Pada rapat ini sejumlah program dan proyek bakal menjadi sasaran tembak lantaran diduga adanya penyelewengan bahkan fiktif. Seperti proyek Sapa-Pakuure yang digelontorkan anggaran sebesar Rp 2,48 miliar diduga fiktif alias tidak ada pekerjaan.

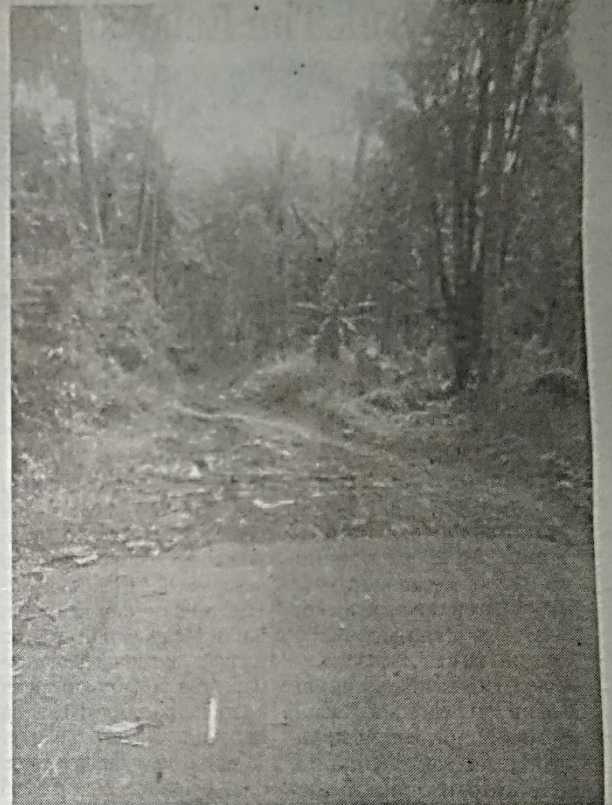
Dugaan fiktif pada proyek Sapa-Pakuure dikarenakan dari hasil pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Sekretaris Komisi II Jaclyn Koloay bersama sejumlah LSM, tidak terlihat adanya penambahan volume. Padahal baik pada APBD induk maupun APBD Perubahan tercantum pembiayaan proyek yang sudah dikerjakan sejak 2017 dan juga turut diduga bermasalah.

"Sempat dikatakan bahwa pada anggaran proyek Sapa-Pakuure dengan anggaran Rp 2,48 adalah lucuran. Dalam artian pada tahun anggaran 2018 sebelumnya belum sempat terbayar, sedangkan pekerjaan fisik sudah. Sehingga pembayarannya ditata lagi lewat APBD 2019. Menjadi pertanyaan mengapa ditata di APBD induk dan Perubahan. Selain itu juga informasi yang didapat pekerjaan 2018 dikenakan TGR, lalu kenapa sampai terjadi hutang," sebut Koloay pada wartawan harian ini Senin (20/04).

Dia berjanji akan memintakan pertanggungjawaban pada LKPJ nanti, apalagi anggaran yang dikeluarkan

tidak kecil. Selain Sapa-Pakuure, turut diangkat juga bendungan dan irigasi Tongop di Kecamatan Tenga. Dikatakannya banyak sekali kegagalan pada pekerjaan proyek yang sempat menjadi viral pada akhir tahun lalu. Terutama dari volume dan kualitas pekerjaan, belum lagi dengan dugaan mark up anggaran. Makanya bupati lewat instansi terkait wajib memberikan penjelasan dengan jujur.

"Saya pernah mencoba memanggil instansi terkait dalam hal ini PU untuk RDP, tapi kami kesulitan. Lantaran tahun lalu DPRD belum juga memiliki AKD. Karena itu di pembahasan LKPJ nanti akan kami angkat supaya jelas. Apalagi banyaknya keluhan dari petani dan diduga tidak dapat berfungsi di saat musim kemarau. Menurut saya uang rakyat harus digunakan secara tepat dan benar, jangan dipermainkan demi kepentingan pribadi dan golongan. Hasilnya nanti bila memperkuat dugaan akan kita teruskan ke proses hukum," tukasnya.



Ketua GMPK Minsel Jhon Senduk mendukung untuk dikulitinya proyek-proyek fisik dan yang diduga terjadi proyek korupsi. DPRD sebagai representasi rakyat wajib memintakan pertanggungjawaban dari bupati sebagai kepala daerah. Lanjut bila didapati adanya keganjilan, jangan ragu membawa ke ranah hukum. Sebab tiap sen APBD wajib dipertanggungjawabkan.

"Kami sangat mendukung upaya DPRD menguliti proyek-proyek yang berpotensi kerugian bagi negara. Di Minsel sangat banyak, selain apa yang disebutkan anggota DPRD Jaclyn Koloay ada juga yang lain. Sebut saja green house, bibit buah dan bibit gaharu. Semoga saja tidak lepas dan bila ditemukan penyelewengan, pelaku diseret ke ranah hukum," pungkasnya.^(vtr)